



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama (*Key Perfomance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk:

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;

- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Pendahuluan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) dan II (dua) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap SKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi.
Pada Tanggal 9 September 2014

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 28

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 28 TAHUN 2014
TANGGAL: 9 September 2014

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak	Angka melek huruf (AMH) -	Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Angka rata-rata lama sekolah	Jumla seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Angka partisipasi kasar SD/MI	Jumlah seluruh murid sedang sekolah di SD/ sederajat ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 7 – 12 tahun	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Angka partisipasi kasar SLTP	Jumlah seluruh murid sedang sekolah di SMP/ sederajat ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 13 – 15 tahun	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

		Angka partisipasi kasar SLTA	$\frac{\text{Jumlah seluruh murid sedang sekolah di SMA/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah seluruh murid usia 7 – 12 tahun di SD/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	$\frac{\text{Jumlah seluruh murid usia 13 – 15 tahun di SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	$\frac{\text{Jumlah seluruh murid usia 16 – 18 tahun di SMA/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Persentase anak dari keluarga miskin usia 7-18 yang bisa mengakses pendidikan (sekolah)	$\frac{\text{Jumlah seluruh murid dari keluarga miskin yang sedang sekolah (SD/ sederaja, SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat)}}{\text{Jumlah seluruh anak dari keluarga miskin usia 7-18 tahun}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka usia harapan hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah desa / kelurahan UCI}}{\text{Seluruh desa / kelurahan}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1}}{\text{Jumlah seluruh pasien miskin di kabupaten / kota}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)	$\frac{\text{Banyaknya kematian bayi (dibawah 1 tahun) selama tahun tertentu}}{\text{Banyaknya kelahiran hidup}} \times 1.000$	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
		Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)	$\frac{\text{Banyaknya kematian ibu (saat hamil, melahirkan dan nifas) selama tahun tertentu}}{\text{Jumlah saat ibu hamil, melahirkan dan nifas}} \times 100.000$	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah

Persentase balita gizi buruk	Jumlah balita gizi buruk ----- x 100 % Jumlah balita	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Rasio posyandu per satuan balita	Jumlah posyandu ----- x 1.000 Jumlah balita	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah anak ----- Jumlah keluarga	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Rasio akseptor Keluarga Berencana	Jumlah akseptor Keluarga Berencana ----- x 100 % Jumlah pasangan usia subur	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Cakupan peserta Keluarga Berencana aktif	Jumlah pasangan usia subur / PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x 100 % Seluruh pasangan usia subur di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk	Jumlah rumah sakit ----- x 10.000 Jumlah penduduk	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Rasio dokter per satuan penduduk	Jumlah dokter ----- x 1000 Jumlah penduduk	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Rasio tenaga medis per 1000 penduduk	Jumlah tenaga kefarmasian ----- x 1000 Jumlah penduduk	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

		Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk miskin Banyuwangi yang berobat gratis melalui Jamkesda	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin yang berobat gratis (Jamkesda)}}{\text{Jumlah penduduk miskin Banyuwangi}} \times 100$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian	Pertumbuhan sektor pertanian	$\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian th n} - \text{PDRB Sektor Pertanian tahun n-1}}{\text{PDRB Sektor Pertanian th n-1}} \times 100$	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
		Pertumbuhan sektor perkebunan	$\frac{\text{PDRB Sektor Perkebunan th n} - \text{PDRB Sektor Perkebunan tahun n-1}}{\text{PDRB Sektor Perkebunan th n-1}} \times 100$	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
		Pertumbuhan sektor kehutanan	$\frac{\text{PDRB Sektor Kehutanan th n} - \text{PDRB Sektor Kehutanan tahun n-1}}{\text{PDRB Sektor Kehutanan th n-1}} \times 100$	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
		Pertumbuhan sektor peternakan	$\frac{\text{PDRB Sektor Peternakan th n} - \text{PDRB Sektor Peternakan tahun n-1}}{\text{PDRB Sektor Peternakan th n-1}} \times 100$	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan
		Nilai tukar petani	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (jt)}}{\text{Indeks yang dibayar petani}} \times 100 \%$	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
		Pertumbuhan sektor perikanan	$\frac{\text{PDRB Sektor Perikanan th n} - \text{PDRB Sektor Perikanan tahun n-1}}{\text{PDRB Sektor Perikanan th n-1}} \times 100$	Dinas Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan
		Konsumsi ikan	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi ikan (Kg)}}{\text{Target daerah (Kg)}} \times 100 \%$	Dinas Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan
4.	Berkembangnya industri olahan dan kreatif berbasis pertanian	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	$\frac{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan th (n)} - \text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan th (n-1)}}{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan th (n-1)}} \times 100$	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan

		Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	$\frac{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan th (n)} - \text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan th (n-1)}}{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan (th (n-1))}} \times 100$	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan
5.	Berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal	Jumlah Kunjungan wisata domestik	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dalam tahun n	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Kunjungan wisata mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dalam tahun n	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Jumlah group kesenian	Jumlah group kesenian per 10.000 penduduk	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam tahun n	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Tersedianya sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100 \%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7.	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	Kontribusi UKM terhadap total PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB UKM}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100 \%$	Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
8	Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah	Perda ekonomi kerakyatan	Jumlah Perda ekonomi kerakyatan	Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM

		Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
9	Berkembangnya infrastruktur dan tata ruang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100 \%$	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}} \times 100 \%$	Dinas PU Pengairan	Dinas PU Pengairan
		Rasio bangunan pengamanan pantai dengan panjang pantai yang terkenan abrasi	$\frac{\text{Jumlah bangunan yang terkena abrasi}}{\text{Jumlah bangunan pengaman pantai yang ada}} \times 100 \%$	Dinas PU Pengairan	Dinas PU Pengairan
		Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi yang diperbaiki}}{\text{Panjang jaringan irigasi yang ada}} \times 100 \%$	Dinas PU Pengairan	Dinas PU Pengairan
		Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah tempat ibadah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000$	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000$	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Rasio rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100 \%$	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) ----- x 100 % Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)	Dinas PU Pengairan	Dinas PU Pengairan
	Rumah tangga ber-Sanitasi	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi ----- x 100 % Jumlah rumah tinggal	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Luas Ruang Terbuka Hijau ----- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW ----- x 100 % Rencana peruntukan	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Bappeda
	Luas wilayah produktif	Jumlah Luas wilayah produktif ----- x 100 % Jumlah luas seluruh wilayah budidaya	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Bappeda
	Luas wilayah industri	Jumlah Luas wilayah industri ----- x 100 % Jumlah luas seluruh wilayah budidaya	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Bappeda
	Luas wilayah banjir	Jumlah Luas wilayah banjir ----- x 100 % Jumlah luas seluruh wilayah budidaya	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Bappeda
	Luas wilayah kekeringan	Jumlah Luas wilayah kekeringan ----- x 100 % Jumlah luas seluruh wilayah budidaya	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Bappeda
	Luas wilayah perkotaan	Jumlah Luas wilayah perkotaan ----- x 100 % Jumlah luas seluruh wilayah budidaya	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Bappeda

		Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui Kendaraan roda 4 ----- x 100 % Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
10.	Meningkatnya akses transportasi dan informasi	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan kondisi baik ----- Panjang jalan seluruhnya	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Persentase akses jalan kabupaten yang beraspal	Panjang jalan kabupaten yang beraspal ----- x 100 Panjang jalan kabupaten	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ----- x 100 Panjang jalan kabupaten	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Jaringan telekomunikasi sampai pedesaan	Jumlah WiFi gratis yang terpasang	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Web site milik pemerintah daerah	Ada / Tidak	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
11.	Meningkatnya investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) (Milyar Rp)	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA)	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

		<div>Pertumbuhan investasi</div> <div>$\frac{\text{Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) Th. (n) - Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) Th. (n -1)}}{\text{Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) Th. (n-1)}} \times 100 \%$</div>	<div>Badan Pelayanan Perijinan Terpadu</div>	<div>Badan Pelayanan Perijinan Terpadu</div>
		<div>Rasio daya serap tenaga kerja</div> <div>$\frac{\text{Pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Pencari kerja yang terdaftar}} \times 100 \%$</div>	<div>Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi</div>	<div>Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi</div>
		<div>Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB</div> <div>$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100 \%$</div>	<div>Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan</div>	<div>Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan</div>
		<div>Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)·</div> <div>$\frac{\text{Realisasi PMDN tahun evaluasi - Realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi}}{\text{Realisasi PMDN sebelum evaluasi}} \times 100 \%$</div>	<div>Badan Pelayanan Perijinan Terpadu</div>	<div>Badan Pelayanan Perijinan Terpadu</div>
12.	Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran	<div>Tingkat kemiskinan</div> <div>$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}}$</div>	<div>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</div>	<div>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</div>
		<div>Tingkat pengangguran terbuka ·</div> <div>$\frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \%$</div>	<div>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</div>	<div>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</div>
		<div>Jumlah penempatan tenaga kerja formal (orang)</div>	<div>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</div>	<div>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</div>
		<div>Jumlah tenaga kerja yang diserap disektor informal (orang)</div>	<div>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</div>	<div>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</div>

		Persentase penduduk yang bekerja	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \%$	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Pencari kerja yang terdaftar}} \times 100 \%$	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}}$	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari produksi kelompok tani}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100 \%$	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
		Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda pada tahun	$\frac{\text{Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda pada tahun n}}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100 \%$	Dinas Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan
		Produksi perikanan kelompok nelayan	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan}}{\text{Jumlah produksi ikan di daerah}} \times 100 \%$	Dinas Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan
		LPM Berprestasi	$\frac{\text{Jumlah LPM Berprestasi}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100 \%$	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

14.		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat}}{\text{Total program pemberdayaan masyarakat}} \times 100 \%$	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat}}{\text{Total pasca program pemberdayaan masyarakat}} \times 100 \%$	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Persentase penanganan kasus KDRT	$\frac{\text{Jumlah Kasus KDRT}}{\text{Jumlah Kasus KDRT yang mendapat penanganan}} \times 100 \%$	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100 \%$	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100 \%$	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah pengaduan / laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100 \%$	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

15.	Berkembangnya program perlindungan dan jaminan sosial	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	$\frac{\text{Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}} \times 100 \%$	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PMKS yang memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100 \%$	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial}}{\text{Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100 \%$	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penurunan PMKS	$\frac{\text{Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Tahun n} - \text{Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada}}{\text{Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada}} \times 100 \%$	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Prosentase penduduk mempunyai jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memperoleh jaminan sosial}}{\text{Jumlah seluruh penduduk yang seharusnya memperoleh jaminan sosial}} \times 100 \%$	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16.	Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum	Jumlah pengaduan masyarakat tentang pelanggaran hukum	Menunjukkan Jumlah pengaduan masyarakat tentang pelanggaran hukum	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
		Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah kecelakaan lalu lintas	Menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas dalam tahun x	Dinas Perhubungan, Kominfo	Dinas Perhubungan, Kominfo
		Penegakan PERDA	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda}} \times 100 \%$	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

		Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 10.000$	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah demo	Jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 tahun	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
17.	Meningkatnya pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} \times 100 \%$	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
		Kerusakan kawasan hutan	$\frac{\text{Luas kerusakan kawasan hutan}}{\text{Luas kawasan hutan}} \times 100 \%$	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
18.	Berkembangnya jejaring kekuatan ekonomi	Jumlah Kerja sama dibidang pengembangan perekonomian dengan lembaga / daerah lain	Jumlah MOU	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Tingkat pertumbuhan pasar tradisional	$\frac{\text{Jumlah pasar tradisional th (n)} - \text{Jumlah pasar tradisional th (n-1)}}{\text{Jumlah pasar tradisional th (n-1)}} \times 100$	Dinas Pendapatan	Dinas Pendapatan
		Persentase pemanfaatan produk daerah (lokal) oleh masyarakat Banyuwangi	$\frac{\text{Jumlah produk daerah (lokal) yg dimanfaatkan}}{\text{Jumlah seluruh produk daerah (lokal)}} \times 100$	Dinas Perindustrian, perdagangan dan pertambangan	Dinas Perindustrian, perdagangan dan pertambangan
19.	Meningkatnya kapabilitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Persentase jumlah keluhan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah keluhan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah keluhan masyarakat}} \times 100 \%$	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
20.	Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	Sistim Informasi Manajemen Pemerintah Daerah	Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan, Kominfo	Dinas Perhubungan, Kominfo
		Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun n	Inspektorat dan, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Inspektorat dan, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Nilai dan Peringkat Laporan	Nilai dan Peringkat hasil penilaian LPPD pada tahun n oleh Tim	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Kemendagri		
		Nilai dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai dan Predikat hasil evaluasi AKIP pada tahun n oleh Tim Kemen PAN-RB	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LI NGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

SKPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
SEKRETARIAT DAERAH	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	Publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di tempat-tempat umum	Bagian Humas & Protokol	Sekretariat Daerah
		Kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Peringkat	Nilai dan Peringkat hasil penilaian LPPD pada tahun n oleh Tim Kemendagri	Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	Nilai dan Predikat hasil evaluasi AKIP pada tahun n oleh Tim Kemen PAN-RB	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	Persentase hasil survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Pemerintah Daerah	Bagan Organisasi	Sekretariat Daerah
		Persentase jumlah keluhan masyarakat yang diselesaikan	%	Jumlah keluhan masyarakat yang diselesaikan ----- x 100 % Jumlah keluhan masyarakat	Bagian Orgnisasi	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan pemerintah daerah	Jumlah sistem informasi pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (SIBIJAK) dalam perumusan kebijakan	Sistem	Jumlah sistem informasi pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Bagian Pembangunan	Sekretariat Daerah

	Pemerintah Daerah		(SIBIJAK)		
Meningkatnya penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SOP penyusunan Peraturan Perundang-undangan	SOP	Jumlah SOP dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum	Sekretariat Daerah
	Jumlah Peraturan Perundang – undangan yang diselesaikan dan disahkan (Perda, Perbup, Kpts)	Perda, Perbup. Kpts	Menunjukkan jumlah Peraturan Perundang – undangan yang diselesaikan dan disahkan	Bagian Hukum	Sekretariat Daerah
Optimalnya pedokumentasian dan informasi hukum daerah	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Hukum (Siskum)	%	$\frac{\text{Jumlah Per-UU-an yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah Per-UU-an yang ada}} \times 100 \%$	Bagian Hukum	Sekretariat Daerah
Meningkatnya penanganan dan penyelesaian masalah hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah	Persentase kasus/permasalahan hukum yang mendapatkan penanganan	%	$\frac{\text{Jumlah kasus/permasalahan hukum yang mendapatkan penanganan}}{\text{Jumlah kasus/permasalahan hukum yang ada}} \times 100 \%$	Bagian Hukum	Sekretariat Daerah
	Persentase penyelesaian kasus hukum disidang pengadilan	%	$\frac{\text{Jumlah kasus / permasalahan hukum yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus/permasalahan hukum yang disidangkan di pengadilan}} \times 100 \%$	Bagian Hukum	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pemantauan, evaluasi, pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa	Jumlah kegiatan Penilaian kinerja Camat, Lurah dan Kades berprestasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt	Pelaksanaan penilaian kinerja camat, lurah dan kades	Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah
	Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta administrasi pemerintahan desa	Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah
	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan pelayanan administrasi terpadu	Kec	Kecamatan yang melaksanakan pelayanan administrasi terpadu	Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah
Meningkatnya penanganan /	Persentase penyelesaian kasus tanah	%	Jumlah kasus tanah yang diselesaikan	Bagian	Sekretariat

penyelesaian konflik-konflik pertanahan			----- x 100 % Jumlah kasus yang terdaftar	Pemerintahan	Daerah
	Persentase lahan/tanah bersertifikat	%	Jumlah lahan/tanah bersertifikat ----- x 100 % Jumlah seluruh lahan/bidang tanah yang seharusnya bersertifikat	Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah
Meningkatnya hubungan antar daerah / antar lembaga dalam rangka peningkatan perekonomian dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah kerja sama yang dilaksanakan	MOU	Menunjukkan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pembinaan dan penataan kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah	Persentase SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan tugas sesuai dg kewenangan, tugas pokok dan fungsinya	%	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan tugas sesuai wewenang, tugas pokok dan fungsinya ----- x 100 % Jumlah SKPD/Unit Kerja	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
	Persentase SKPD yang telah menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dengan baik	%	Jumlah SKPD yang telah menyusun Anjab dengan baik sesuai aturan yang berlaku ----- x 100 % Jumlah SKPD	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
	Persentase SKPD yang telah menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dengan baik	%	Jumlah SKPD yang telah menyusun ABK dengan baik sesuai aturan yang berlaku ----- x 100 % Jumlah SKPD	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
	Persentase implementasi hasil Anjab dan ABK	%	Jumlah SKPD yang telah mengimplementasikan hasil Anjab dan ABK ----- x 100 % Jumlah SKPD	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah

Meningkatnya pembinaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan LAKIP	Dok Lakip	Tersusunnya dan terkirimnya dokumen Lakip tepat waktu kepada pihak-pihak yang berwenang	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
	Peningkatan nilai dan predikat AKIP	Nilai dan predikat	Nilai dan predikat hasil penilaian Akip oleh pihak-pihak berwenang	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
	Persentase SKPD yang menyusun LAKIP	%	Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP SKPD ----- x 100 % Jumlah SKPD	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
	Persentase SKPD yang menyusun Penetapan Kinerja (PK/Tapkin)	%	Jumlah SKPD yang menyusun PK/Tapkin ----- x 100 % Jumlah SKPD	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
	IKU yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati / Keputusan Bupati	Dokumen IKU	Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan SKPD	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pembinaan dan penataan penyelenggaraan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah menyusun SOP	%	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang telah menyusun SOP ----- x 100 % Jumlah SKPD/Unit Kerja	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pembinaan dan penataan penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pemerintah daerah	%	Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui survey layanan publik	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
	Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)	%	Jumlah SKPD yang telah menyusun SPP ----- x 100 % Jumlah SKPD/Unit Kerja	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah ditetapkan dalam Perbup dari yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 15 SPM	Perbup	SPM yang sudah ditetapkan dalam Perbup	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah
Meningkatnya	Persentase produk dan jasa UKM/IKM	%	Jumlah produk dan jasa UKM/IKM yang ber	Bagian	Sekretariat

pemberdayaan, peningkatan dan pelayanan sarana perenonomian, perbankan dan penyertaan modal	yang ber SNI		SNI ----- x 100 % Jumlah Produk dan Jasa UKM/IKM	Perekonomian	Daerah
	Jumlah Modal yang tersalurkan pada UKM/KUR	Rp.	Besarnya modal yang tersalurkan pada UKM/KUR	Bagian Perekonomian	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kegiatan produksi dan distribusi perekonomian	Persentase dunia usaha yang berkembang	%	Jumlah dunia usaha yang berkembang ----- x 100 % Jumlah dunia usaha	Bagian Perekonomian	Sekretariat Daerah
	Tersedianya Sistem Informasi Produksi dan distribusi sektor usaha ekonomi	Sistem	Adanya Informasi Produksi dan distribusi sektor usaha ekonomi	Bagian Perekonomian	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah RTS Miskin yang mendapatkan bantuan Raskin dalam tahun x	RTS	Jumlah RTS Miskin yang mendapatkan bantuan dalam tahun x	Bagian Perekonomian	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pelayanan keagamaan, sosial dan kesejahteraan rakyat	Persentase lembaga keagamaan / sosial yang mendapatkan bantuan	%	Jumlah lembaga keagamaan / sosial yang mendapatkan bantuan ----- x 100 % Jumlah lembaga keagamaan / sosial yang mengajukan proposal	Bagian Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah
	Jumlah Kegiatan keagamaan rutin yang dilaksanakan setiap tahun	Kgt	Pelaksanaan kegiatan rutin keagamaan	Bagian Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah
	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	Jumlah tempat ibadah ----- x 1.000 Jumlah penduduk	Bagian Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah
	Persentase lembaga pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) yang berkinerja baik	%	Jumlah lembaga pengelola BAZ yang berkinerja baik	Bagian Kesejahteraan	Sekretariat Daerah

			----- x 100 % Jumlah lembaga pengelola BAZ	Masyarakat	
	Rata-rata penyelesaian Surat Pernyataan Miskin (per SPM) jika persyaratan lengkap dan pejabat yang bertandatangan ada	Menit	Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan SPM (per SPM)	Bagian Kesejahteraan Masyarakat	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pelaporan capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah dalam tahun x	%	Capaian kinerja pembangunan daerah dalam tahun x ----- x 100 % Target kinerja pembangunan daerah dalam tahun x	Bagian Pembangunan	Sekretariat Daerah
	Persentase penyerapan anggaran pembangunan daerah	%	Jumlah realisasi pagu anggaran pembangunan daerah ----- x 100 % Pagu anggaran pembangunan daerah	Bagian Pembangunan	Sekretariat Daerah
	Jumlah LKPJ Bupati disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	LKPJ	LKPJ Bupati disusun tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	Bagian Pembangunan	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pelayanan proses pengadaan barang/jasa pemerintah	Persentase proses pelelangan sesuai usulan SKPD yang dapat dilaksanakan sesuai jadwal	%	Jumlah bidang pengadaan yang telah dilelang ----- x 100 % Jumlah seluruh bidang pengadaan yang direncanakan dilelang	Bagian Pembangunan	Sekretariat Daerah
	Tingkat kegagalan pelaksanaan pelelangan	%	Jumlah bidang pengadaan yang gagal lelang ----- x 100 % Jumlah seluruh bidang pengadaan yang direncanakan dilelang	Bagian Pembangunan	Sekretariat Daerah
Peningkatan kualitas pelayanan tamu-tamu pemerintah secara protokoler	Tingkat kepuasan layanan tamu-tamu pemerintah yang dilakukan oleh petugas	%	Tingkat kepuasan tamu-tamu pemerintah sesuai hasil survey	Bagian Humas dan Protokol	Sekretariat Daerah
Peningkatan kualitas pelayanan dan kenyamanan penggunaan fasilitas kantor	Tingkat kepuasan pelayanan dan penggunaan fasilitas kantor	%	Tingkat kepuasan pelayanan dan penggunaan fasilitas kantor sesuai hasil survey	Bagian Umum	Sekretariat Daerah

	Tertib administrasi pengelolaan keuangan	Laporan keuangan disusun sesuai aturan yang berlaku	Laporan	Laporan keuangan disusun sesuai aturan yang berlaku dan tepat waktu	Bagian Umum	Sekretariat Daerah
		Buku standar satuan harga barang daerah	Buku	Tersedianya Buku Standar Satuan Harga Barang Daerah sesuai hasil survey di pasaran	Bagian Perlengkapan	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya perencanaan, pengelolaan dan distribusi barang daerah	Persentase pengadaan barang daerah sesuai usulan/kebutuhan unit kerja	%	Jumlah / jenis pengadaan barang ----- x 100 % Jumlah/jenis pengadaan barang yang diusulkan unit kerja	Bagian Perlengkapan	Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD	Meningkatnya fasilitasi pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah	Persentase jumlah rancangan Perda ditetapkan menjadi Perda	%	Jumlah rancangan Perda disahkan menjadi Perda ----- x 100 % Jumlah rancangan Perda yang dibahas	Bagian Legislasi	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kapasitas lembaga DPRD	Jumlah kunjungan kerja/study banding yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt	Cukup Jelas	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
		Jumlah penerimaan kunjungan kerja/study banding yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt	Cukup Jelas	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
		Jumlah diklat, seminar, workshop dan kegiatan sejenisnya yang diikuti dalam 1 tahun bagi aparatur DPRD	Kgt	Cukup Jelas	Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
		Jumlah diklat, seminar, workshop dan kegiatan sejenisnya yang diikuti dalam 1 tahun bagi pimpinan dan anggota DPRD	Kgt	Cukup Jelas	Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD
	Terciptanya harmonisasi hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif serta masyarakat	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan eksekutif (pejabat Pemda) dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt	Cukup Jelas	Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyebarluasan informasi kinerja DPRD	Jumlah mass media yang melaksanakan kerja sama dalam penyebarluasan informasi kinerja DPRD	Mass Media	Jumlah mass media yang menjadi rekanan dalam penyebarluasan informasi kinerja DPRD (cetak dan elektronik)	Bagian Legislasi	Sekretariat DPRD

INSPEKTORAT	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif dan efisien	Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	Hasil penilaian/evaluasi BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah	Inspektur Pembantu dan Sekretariat	Inspektorat
		Jumlah temuan hasil audit reguler, APIP dan eksternal yang ditindaklanjuti	Temuan	Jelas	Inspektur Pembantu dan Sekretariat	Inspektorat
		Jumlah SKPD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)	SKPD	Jelas	Inspektur Pembantu dan Sekretariat	Inspektorat
		Jumlah kasus-kasus yang terselesaikan	Kasus	Menunjukkan jumlah kasus-kasus pelanggaran PNS yang masuk / dilaporkan ke Inspektorat yang diselesaikan	Inspektur Pembantu dan Sekretariat	Inspektorat
	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku	Persentase SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP	%	Jumlah SKPD yang sudah menerapkan aspek lingkungan pengendalian unsur-unsur SPIP ----- x 100 % Jumlah SKPD	Inspektur Pembantu dan Sekretariat	Inspektorat
	Meningkatnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Persentase SKPD yang menyusun rencana penyerapan, rencana pengadaan barang/jasa dan disiplin melaksanakannya	%	Jumlah SKPD yang menyusun rencana penyerapan, rencana pengadaan barang/jasa dan disiplin melaksanakannya ----- x 100 % Jumlah SKPD	Inspektur Pembantu dan Sekretariat	Inspektorat
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SKPD)	Persentase SKPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan baik	%	Jumlah SKPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan baik sesuai peraturan yang berlaku ----- x 100 % Jumlah SKPD	Inspektur Pembantu dan Sekretariat	Inspektorat
	Optimalnya evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi / Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai hasil PMPRB	Nilai	Hasil PMPRB melalui Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi dalam tahun x	Inspektur Pembantu dan Sekretariat	Inspektorat
	Meningkatnya kepatuhan	Persentase Pegawai yang telah	%	Jumlah PNS eselon III ke atas yang	Inspektur	Inspektorat

	aparatur pemerintah terhadap Peraturan Perundang-undangan	menyampaikan LHKPN (eselon III ke atas)		menyampaikan LHKPN ----- x 100 % Jumlah seluruh PNS eselon III ke atas	Pembantu dan Sekretariat	
	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)pada tahun x	SKPD	SKPD yang dipilih dan ditetapkan sebagai Zona Integritas dengan Keputusan Bupati	Inspektur Pembantu dan Sekretariat	Inspektorat
		Jumlah SKPD Zona Integritas yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)pada tahun x	SKPD	SKPD Zona Integritas yang diusulkan menjadi WBK/WBBM kepada lembaga/instansi yang berwenang	Inspektur Pembantu dan Sekretariat	Inspektorat
DINAS PENDIDIKAN	Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga pendidikan	Angka melek huruf (AMH) *	%	Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	Bidang Pendidikan Menengah, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal	Dinas Pendidikan
		Rata-rata nilai Ujian Nasional SD/MI	Nilai	Cukup Jelas	Bidang Pendidikan TK dan SD	Dinas Pendidikan
		Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP/Mts	Nilai	Cukup Jelas	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
		Rata-rata nilai Ujian Nasional SMA/MA/SMK	Nilai	Cukup Jelas	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
		Angka rata-rata lama sekolah	%	Jumla seluruh tahun pendidikan penduduk usia	Bidang	Dinas

		15 tahun ke atas ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	Pendidikan Menengah, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal	Pendidikan
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	%	Jumlah sekolah SD/MI ----- x 10.000 Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan	Dinas Pendidikan
Rasio guru/murid SD/MI	%	Jumlah guru SD/MI ----- x 10.000 Jumlah murid SD/MI	Bidang Pendidikan TK dan SD	Dinas Pendidikan
Rasio guru/murid per kelas rata-rata pada sekolah pendidikan menengah	%	Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas ----- x 10.000 Jumlah murid pendidikan menengah	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	%	Jumlah sekolah SLTP/MTs ----- x 10.000 Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid	%	Jumlah guru SLTP/MTs ----- x 10.000 Jumlah murid SLTP/MTs	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	%	Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas ----- x 10.000 Jumlah murid pendidikan menengah	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	%	Jumlah sekolah SMA/SMK/MA ----- x 10.000	Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan

		Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun	Menengah	
Rasio guru terhadap murid	%	$\frac{\text{Jumlah guru SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah murid SMA/SMK/MA}} \times 10.000$	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	%	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan menengah}} \times 10.000$	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100 \%$	Bidang Pendidikan TK dan SD	Dinas Pendidikan
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	$\frac{\text{Jumlah Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD/MI}} \times 100 \%$	Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan	Dinas Pendidikan
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	$\frac{\text{Jumlah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs}} \times 100 \%$	Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan	Dinas Pendidikan
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	$\frac{\text{Jumlah Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMA/SMK/MA}} \times 100 \%$	Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan	Dinas Pendidikan
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Sistem	Pemanfaatan sistem dan informasi dalam pelayanan pendidikan	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara on line untuk semua	Sekolah	PPDB pada semua sekolah negeri menggunakan sistem secara on line	Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan

	sekolah negeri (SLTP – SLTA)			Menengah	
Perluasan dan pemerataan akses pendidikan	Angka partisipasi kasar SD/MI	%	Jumlah seluruh murid sedang sekolah di SD/ sederajat ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 7 – 12 tahun	Bidang Pendidikan TK dan SD	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi kasar SLTP	%	Jumlah seluruh murid sedang sekolah di SMP/ sederajat ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 13 – 15 tahun	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi kasar SLTA	%	Jumlah seluruh murid sedang sekolah di SMA/ sederajat ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 16 – 18 tahun	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A ·	%	Jumlah seluruh murid usia 7 – 12 tahun di SD/ sederajat ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 7 – 12 tahun	Bidang Pendidikan TK dan SD	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B ·	%	Jumlah seluruh murid usia 13 – 15 tahun di SMP/ sederajat ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 13 – 15 tahun	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	%	Jumlah seluruh murid usia 16 – 18 tahun di SMA/ sederajat ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 16 – 18 tahun	Bidang Pendidikan Menengah, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah (SD/MI)	%	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD/MI ----- x 1000 Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	Bidang Pendidikan TK dan SD	Dinas Pendidikan

Angka partisipasi sekolah (SLTP/MTs)	%	Jumlah siswa kelompok usia 13 – 15 tahun yang bersekolah di tingkat SLTP/MTs ----- x 1000 Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
Angka partisipasi sekolah (SMA/SMK/MA)	%	Jumlah siswa kelompok usia 16 – 18 tahun yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA ----- x 1000 Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak ----- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun	Bidang Pendidikan TK dan SD	Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	Bidang Pendidikan TK dan SD	Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	Bidang Pendidikan TK dan SD, Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA ----- x 100 % Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan

				ajaran sebelumnya		
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis ----- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 15 tahun ke atas	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI ----- x 100 % Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	Bidang Pendidikan TK dan SD	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA ----- x 100 % Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya	Bidang Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
	DINAS KESEHATAN	Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk	Angka usia harapan hidup	Th	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Bidang-bidang pada Dinas Kesehatan
			Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)	%	Banyaknya kematian bayi (dibawah 1 tahun) selama tahun tertentu ----- x 1.000 Banyaknya kelahiran hidup	Bidang Bina Kesehatan Keluarga
			Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)	%	Banyaknya kematian ibu (saat hamil, melahirkan dan nifas) selama tahun tertentu ----- x 100.000 Jumlah saat ibu hamil, melahirkan dan nifas	Bidang Bina Kesehatan Keluarga
			Angka kematian balita	%	Jumlah kematian balita ----- x 100 %	Bidang Bina Kesehatan

			Jumlah balita	Keluarga	
	Persentase balita gizi buruk *	%	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100 \%$	Bidang Bina Kesehatan Keluarga	Rumah Sakit Umum Daerah
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) *	%	$\frac{\text{Jumlah desa / kelurahan UCI}}{\text{Seluruh desa / kelurahan}} \times 100 \%$	Bidang Bina Penyehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di suatu wilayah kerja selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$	Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit HIV/AIDS	%	$\frac{\text{Jumlah penderita HIV/AIDS yang ditangani sesuai SOP di suatu wilayah kerja selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penderita HIV/AIDS yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$	Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Dinas Kesehatan
	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	$\frac{\text{Jumlah ibu melahirkan yang ditangani tenaga kesehatan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah ibu melahirkan pada kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$	Bidang Bina Kesehatan Keluarga	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1}}{\text{Jumlah seluruh pasien miskin di kabupaten / kota}} \times 100 \%$	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan
	Cakupan kunjungan bayi *	%	Jumlah bayi post neonatal memperoleh	Bidang Bina	Dinas

		<p>pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah seluruh sasaran bayi di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama</p>	Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Kesehatan
Persentase kecamatan bebas rawan gizi	%	<p>Jumlah kecamatan bebas rawan gizi</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah kecamatan</p>	Bidang Bina Kesehatan Keluarga	Dinas Kesehatan
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani *	%	<p>Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama</p>	Bidang Bina Kesehatan Keluarga	Dinas Kesehatan
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	<p>Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama</p>	Bidang Bina Kesehatan Keluarga	Dinas Kesehatan
Rasio posyandu per satuan balita	%	<p>Jumlah posyandu</p> <p>----- x 1.000</p> <p>Jumlah balita</p>	Bidang Bina Kesehatan Keluarga	Dinas Kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	<p>Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</p> <p>----- x 100 %</p>	Bidang Bina Kesehatan Keluarga	Dinas Kesehatan

			Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama		
Meningkatnya kuantitas, kualitas distribusi dan profesionalitas tenaga kesehatan	Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah rumah sakit}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan
	Rasio dokter per satuan penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan
	Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah tenaga kefarmasian}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan
	Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah tenaga ahli gizi}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan
	Rasio tenaga medis per 1000 penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah tenaga kefarmasian}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan
	Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah tenaga keperawatan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan
	Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan
	Jumlah Tenaga Medis	Org	Jumlah Tenaga Medis	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan	Dinas Kesehatan

				Farmasi	
	Keperawatan (perawat dan bidan)	Org	Jumlah Keperawatan (perawat dan bidan)	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan
	Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)	Org	Jumlah Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan
	Tenaga kesehatan	Org	Jumlah Tenaga kesehatan	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan
	Sanitarian	Org	Jumlah Sanitarian	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan
	Ahli gizi	Org	Jumlah Ahli gizi	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan
Meningkatnya sarana / prasarana kesehatan	Jumlah Rumah Sakit	RS	Jumlah Rumah Sakit	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan
	Jumlah Puskemas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling	Pusk, Pusk pembt, pusling	Jumlah Puskemas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan
	Jumlah Poliklinik	Poliklinik	Jumlah Poliklinik	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan
	Posyandu aktif	Posyandu	Jumlah Posyandu aktif	Bidang Bina Pelayanan	Dinas Kesehatan

					Kesehatan dan Farmasi		
		Cakupan puskesmas	%	Jumlah puskesmas ----- x 100 % Jumlah seluruh kecamatan	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan	
		Cakupan pembantu puskesmas	%	Jumlah pembantu puskesmas ----- x 100 % Jumlah seluruh desa	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan	
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk	%	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu ----- x 1000 Jumlah penduduk	Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi	Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kesehatan lingkungan	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi ----- x 100 % Jumlah rumah tinggal	Bidang Bina Penyehatan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		Persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air yang layak dikonsumsi	%	Jumlah rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air yang layak dikonsumsi ----- x 100 % Jumlah rumah tangga	Bidang Bina Penyehatan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	%	Jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat ----- x 100 % Jumlah rumah tangga	Bidang Bina Penyehatan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Meningkatnya kualitas pemuda	Persentase jumlah pemuda terampil	%	Jumlah pemuda dilatih yang mengembangkan hasil pelatihan ----- x 100 % Jumlah pemuda yang dilatih	Bidang Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Persentase organisasi pemuda aktif	%	Jumlah organisasi pemuda terdaftar ----- x 100 % Jumlah organisasi pemuda	Bidang Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga

	Meningkatnya kualitas dan prestasi keolahragaan	Jumlah atlit yang masuk PON mewakili Propinsi Jawa Timur pada tahun x	Atlit	Cukup Jelas	Bidang Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat Provinsi (mendapatkan mendali/tropy) pada tahun x	Atlit	Cukup Jelas	Bidang Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat Nasional (mendapatkan mendali/tropy) pada tahun x	Atlit	Cukup Jelas	Bidang Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah pelatih olahraga	Pelatih	Cukup Jelas	Bidang Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah atlit yang mengikuti kompetisi ditingkat Asia dan Internasional pada tahun x	Atlit	Cukup Jelas	Bidang Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya aktivitas keolahragaan	Jumlah klub olahraga	Klub	Jumlah klup olah raga per 10.000 penduduk	Bidang Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah gedung olahraga	Gedung	Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk	Bidang Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah kegiatan olahraga yang dilaksanakan secara resmi di tingkat kabupaten	Kegt	Kegiatan olah raga	Bidang Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum	%	Jumlah kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum ----- x 100 % Jumlah kecamatan	Bidang Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur	Cabor	Jumlah cabang olahraga yang berkompetisi secara teratur ----- x 100 % Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada	Bidang Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian -----x 100 % Jumlah PDRB	Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor kehutanan -----x 100 % Jumlah PDRB	Bidang Kehutanan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perkebunan (tanaman keras) -----x 100 % Jumlah PDRB	Bidang Perkebunan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan	Tingkat produktifitas padi per hektar	%	Produktifitas padi (ton) ----- x 100 % Luas areal tanam padi (ha)	Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
	Tingkat produksi bahan pangan utama lokal lainnya non padi per hektar	%	Produktifitas bahan pangan utama lokal lainnya non padi (ton) ----- x 100 % Luas areal tanam bahan pangan utama lokal lainnya non padi (ha)	Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
	Jumlah kelompok tani	Kelompok	Jelas	Bidang Pertanian Tanaman Pangan	
	Gabah (ton/gkg)		Produksi per hektar (produktifitas) gabah dalam ton x luas panen (hektar)	Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
	Cakupan bina kelompok petani	%	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan dari pemda tahun n ----- x 100 % Jumlah kelompok petani	Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
	Kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB		Jumlah kontribusi PDRB dari produksi kelompok tani ----- x 100 % Jumlah PDRB	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani	Rp.	Indeks yang diterima petani (jt) ----- x 100 % Indeks yang dibayar petani	Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
	Rata-rata pendapatan per kapita petani	Rp.	Pendapatan rata petani per tahun	Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

	Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi ----- x 100 % Luas total hutan dan lahan kritis	Bidang Kehutanan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
		Kerusakan kawasan hutan	%	Luas kerusakan kawasan hutan ----- x 100 % Luas kawasan hutan	Bidang Kehutanan	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
DINAS PETERNAKAN	Meningkatnya produksi dan produktifitas peternakan	Produksi daging (Ton/Th)	Ton	Jumlah produksi daging konsumsi per tahun	Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak, Bidang Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan
		Produksi telur (Ton/Th)	Ton	Jumlah produksi telur per tahun	Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak, Bidang Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan
		Produksi susu (liter/Th)	Liter	Jumlah produksi susu liter per tahun	Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak, Bidang Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan
		Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	%	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor peternakan ----- x 100 % Jumlah PDRB	Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak, Bidang Kesehatan Hewan dan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Veteriner	Dinas Peternakan
	Menurunnya angka kematian ternak dan kejadian penyakit	Mortalitas ternak (angka kematian ternak)	%	Perkiraan jumlah Mortalitas ternak (angka kematian ternak) per tahun	Bidang Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan
		Kejadian penyakit	%	Perkiraan jumlah Kejadian penyakit per tahun	Bidang Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Meningkatnya kualitas prasarana jalan raya					
		Jumlah Puskewan	Puskewan	Jumlah Puskewan	Bidang Kesehatan Hewan	Dinas Pernakan
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik ·	%	Panjang jalan kondisi baik ----- Panjang jalan seluruhnya	Bidang Bina Marga	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Rasio panjang jalan yang telah beraspal	%	Panjang jalan yang telah beraspal ----- Panjang jalan seluruhnya	Bidang Bina Marga	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Panjang jalan dilalui Roda 4	%	Jumlah panjang jalan (Km) ----- Jumlah penduduk	Bidang Bina Marga	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Panjang jalan yang diaspal (pengaspalan jalan baru) per kapita	Km	Menunjukkan jalan baru yang diaspal perkapita	Bidang Bina Marga	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Panjang jalan beraspal yang diperbaiki (pengaspalan kembali) per kapita	Km	Menunjukkan perbaikan jalan beraspal (pengaspalan kembali) per kapita	Bidang Bina Marga	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Panjang jalan beraspal yang dirawat per kapita	Km	Menunjukkan panjang jalan beraspal yang dirawat per kapita	Bidang Bina Marga	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Tingkat kecepatan perbaikan/perawatan jalan beraspal yang rusak (jalan	Hr	Menunjukkan tingkat kecepatan perbaikan/perawatan jalan beraspal yang	Bidang Bina Marga	Dinas PU Bina Marga, Cipta

	berlubang) setelah diketahui petugas / ada laporan masyarakat		rusak (jalan berlubang) setelah diketahui petugas / ada laporan masyarakat		Karya dan Tata Ruang
	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	%	Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui Kendaraan roda 4 ----- x 100 % Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk	Bidang Bina Marga	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ----- x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	Bidang Bina Marga	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) .	%	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km) ----- x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	Bidang Bina Marga	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Tersedianya prasarana dan sarana perumahan dan permukiman serta air bersih	Jumlah rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang dibangun	Unit	Menunjukkan Rusunawa yang dibangun	Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Rasio rumah layak huni	%	Jumlah rumah layak huni ----- Jumlah penduduk	Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Rumah layak huni	%	Jumlah rumah layak huni ----- x 100 % Jumlah seluruh rumah	Bidang Permukiman	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Rumah tangga pengguna air bersih	%	Jumlah rumah tangga menggunakan air bersih ----- x 100 % Jumlah rumah tangga	Bidang Permukiman	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Rumah tangga pengguna listrik	%	Jumlah rumah tangga menggunakan listrik ----- x 100 %	Bidang Permukiman	Dinas PU Bina Marga, Cipta

Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan tata ruang		Jumlah rumah tangga		Karya dan Tata Ruang
	Rumah tangga ber-Sanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100 \%$	Bidang Permukiman	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Lingkungan pemukiman kumuh	$\frac{\text{Luas lingkungan pemukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$	Bidang Permukiman	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Rasio permukiman layak huni	$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}}$	Bidang Permukiman	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}} \times 100 \%$	Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi peruntukan RTRW}}{\text{Rencana peruntukan}} \times 100 \%$	Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Luas wilayah produktif	$\frac{\text{Jumlah Luas wilayah produktif}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100 \%$	Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Luas wilayah industri	$\frac{\text{Jumlah Luas wilayah industri}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100 \%$	Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Luas wilayah banjir	$\frac{\text{Jumlah Luas wilayah banjir}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100 \%$	Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Luas wilayah pertanian	$\frac{\text{Jumlah Luas wilayah pertanian}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100 \%$	Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

		Luas wilayah kekeringan		$\frac{\text{Jumlah Luas wilayah kekeringan}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100 \%$	Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Luas wilayah perkotaan	%	$\frac{\text{Jumlah Luas wilayah perkotaan}}{\text{Jumlah luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100 \%$	Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang	Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Meningkatnya kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000$	Bidang Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Persentase penanganan sampah	%	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100 \%$	Bidang Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS (M3)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$	Bidang Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Menjaga kebersihan jalan dan fasilitas umum milik Pemda lainnya oleh petugas kebersihan per hari	Kali/hari	Kegiatan membersihkan (menyampu dll) untuk jalan dan fasilitas umum lainnya milik Pemda yang dilakukan oleh petugas kebersihan	Bidang Kebersihan, Bidang Pertamanan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Diraihnya adipura pada tahun n	Adipura	Penghargaan adipura yang diperoleh pada tahun n	Bidang Kebersihan, Bidang Pertamanan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian	Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi	%	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$	Bidang Pembangunan dan Pengembangan	Dinas PU Pengairan
		Rasio Jaringan Irigasi yang diperbaiki	%	$\frac{\text{Jaringan Irigasi yang diperbaiki}}{\text{Panjang jaringan yang ada}} \times 100 \%$	Bidang Pembangunan dan Pengembangan	Dinas PU Pengairan

	Rasio Jaringan Irigasi yang dipelihara	%	Jaringan Irigasi yang diperlihara ----- x 100 % Panjang jaringan yang ada	Bidang Operasi dan Pemeliharaan	Dinas PU Pengairan
	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik ----- x 100 % Luas irigasi Kabupaten	Bidang Operasi dan Pemeliharaan	Dinas PU Pengairan
	Rasio jumlah SDM dengan luasan baku sawah irigasi	%	Jumlah sumber daya manusia ----- x 100 % Jumlah luasan baku sawah irigasi	Bidang Pembangunan dan Pengembangan	Dinas PU Pengairan
	Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill	Unit	Jumlah Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill	Bidang Pembangunan dan Pengembangan	Dinas PU Pengairan
Meningkatnya pengamanan dan pemanfaatan air	Panjang saluran drainase yang dibangun/diperbaiki	M	Menunjukkan panjang drainase yang dibangun	Bidang Pembangunan dan Pengembangan	Dinas PU Pengairan
	Panjang saluran drainase yang dipelihara	M	Menunjukkan panjang drainase yang dipelihara	Bidang Operasi dan Pemeliharaan	Dinas PU Pengairan
	Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan	%	Jumlah ketersediaan air irigasi liter/detik pada setiap musim tanam ----- Jumlah kebutuhan air irigasi liter/detik berdasarkan rencana tata tanam	Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan	Dinas PU Pengairan
	Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS)	%	Jumlah ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau ----- x 100 % Jumlah ketersediaan air dalam 1 tahun	Bidang Pembangunan dan Pengembangan	Dinas PU Pengairan
	Rasio pemanfaatan air tanah dan air permukaan	%	Jumlah air tanah yang dimanfaatkan ----- x 100 % Jumlah air permukaan	Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan	Dinas PU Pengairan
	Sumber air / mata air yang dalam kondisi debit air stabil	%	Jumlah air / mata air yang kondisi debit air stabil	Bidang Bina Manfaat dan	Dinas PU Pengairan

				----- x 100 % Jumlah sumber air yang ada	Kemitraan	
		Daur ulang sistem irigasi		Debit air yang digunakan (ha) ----- x 100 % Debit air yang ada	Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan	Dinas PU Pengairan
		Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar		Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km) ----- x 100 % Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (Km)	Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan	Dinas PU Pengairan
		Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat		Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) ----- x 100 % Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)	Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan	Dinas PU Pengairan
		Rasio bangunan pengamanan pantai dengan panjang pantai yang terkenan abrasi	%	Jumlah bangunan yang terkena abrasi ----- x 100 % Jumlah bangunan pengaman pantai yang ada	Bidang Pembangunan dan Pengembangan	Dinas PU Pengairan
		Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai	M	Panjang bangunan pengaman pantai dan muara sungai yang terbangun (meter)	Bidang Pembangunan dan Pengembangan	Dinas PU Pengairan
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN	Meningkatnya kualitas perdangan dan industri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan ----- x 100 % Jumlah PDRB	Bidang perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan
		Kontribusi PAD dari sektor perdagangan	%	Jumlah Kontribusi PAD dari sektor perdagangan ----- x 100 % Jumlah PAD	Bidang perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan
		Ekspor bersih perdagangan	Rp.	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	Bidang	Dinas

			perdagangan	Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan
Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor perdagangan	Perusahaan	Cukup jelas	Bidang perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan
Cakupan bina kelompok perdagangan / usaha informal	%	Jumlah kelompok perdagangan / usaha informal yang mendapatkan bantuan dari pemda tahun n ----- x 100 % Jumlah kelompok perdagangan / usaha informal	Bidang perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri ----- x 100 % Jumlah PDRB	Bidang industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan
Kontribusi PAD dari sektor industri	%	Jumlah Kontribusi PAD dari sektor industri ----- x 100 % Jumlah PAD	Bidang industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	%	Jumlah Kontribusi PDRB dari industri rumah tangga ----- x 100 % Jumlah PDRB sektor industri	Bidang industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan
Pertumbuhan industri	%	Jumlah industri tahun n - Jumlah industri tahun (n-1) ----- x 100 % Jumlah industri s/d tahun n	Bidang industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

						Pertambangan	
		Ekspor bersih perindustrian .	Rp.	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	Bidang industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan	
		Persentase produk industri daerah yang sudah mendapatkan sertifikasi SNI	%	produk industri daerah yang sudah mendapatkan sertifikasi SNI ----- x 100 % Jumlah produk industri daerah	Bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan	
	Meningkatnya pengelolaan pertambangan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	Jumlah Kontribusi sektor pertambangan ----- x 100 % Jumlah PDRB	Bidang Pertambangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan	
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Meningkatnya kualitas/profesionalisme pengelolaan koperasi	Jumlah koperasi aktif	Koperasi	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT	Bidang Kelembagaan Koperasi, Bidang Usaha Koperasi		
		Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) .	%	Jumlah koperasi aktif ----- x 100 % Jumlah seluruh koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi, Bidang Usaha Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM	
		Jumlah anggota koperasi	Org	Cukup jelas	Bidang Kelembagaan Koperasi, Bidang Usaha Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM	
		Presentase koperasi yang dapat menjalankan usahanya secara mandiri	%	Jumlah koperasi yang dapat menjalankan usahanya secara mandiri ----- x 100 % Jumlah koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi, Bidang Usaha Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM	
		Meningkatnya kualitas UMKM	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 8	UKM	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 8	Bidang UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
			Jumlah BPR / LKM	BPR/LKM	Cukup jelas	Bidang UMKM	Dinas Koperasi

						dan UMKM
		Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Kelompok	Jumlah usaha mikro dan kecil yang aktif	Bidang UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		Jumlah Usaha Menengah	Kelompok	Jumlah usaha menengah yang aktif	Bidang UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		Jumlah UKM yang melakukan pameran dan promosi di luar daerah pada tahun (n)	UKM	Menunjukkan jumlah UKM yang melakukan pameran dan promosi di luar daerah pada tahun (n)	Bidang UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		Kontribusi UMKM dalam PDRB	%	Jumlah kontribusi UMKM ----- x 100 % Jumlah PDRB	Bidang UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		Tingkat penyerapan tenaga kerja UMKM dari total tenaga kerja	%	Jumlah tenaga kerja yang terserap di bidang UMKM ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja	Bidang UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal pada tahun n	%	Jumlah kelompok pedagang / usaha informal yang dibina (mendapatkan bantuan Pemda) pada tahun n ----- x 100 % Jumlah kelompok pedagang / usaha informal yang ada	Bidang UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun n	%	Jumlah kelompok pengrajin yang dibina (mendapatkan bantuan Pemda) pada tahun n ----- x 100 % Jumlah kelompok pengrajin yang ada	Bidang UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya pengelolaan transportasi lalu lintas angkutan jalan	Tingkat kecelakaan lalu lintas jalan raya yang menyebabkan kematian	%	Jumlah kecelakaan lalu lintas jalan raya yang menyebabkan kematian ----- x 100 % Jumlah kecelakaan lalu lintas jalan raya	Bidang Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Jumlah pelanggaran lalu lintas jalan (mobil)	%	Jumlah pelanggaran lalu lintas jalan di jalan protokol (mobil) ----- x 100 % Jumlah pengguna jalan protokol yang	Bidang Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

			menggunakan mobil		
	Jumlah pelanggaran muatan lebih di jalan	Pelanggar an	Menunjukkan jumlah pelanggaran muatan lebih di jalan	Bidang Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan	%	Jumlah komplain pengguna jalan yang masuk ----- x 100 % Jumlah pengguna jalan	Bidang Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Pemasangan Rambu-rambu	%	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu pada tahun n ----- x 100 % Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Bidang Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Jumlah terminal bus	Teminal	Ketersediaan terminal bus	Bidang Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya transpotasi penyebarangan / laut	Jumlah prasarana pelabuhan	Pelabuhan	Menunjukkan jumlah pelabuthan yang beroperasi	Bidang Perhubungan Laut dan Udara	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Jumlah penumpang yang diangkut per tahun	Org	Cukup jelas	Bidang Perhubungan Laut dan Udara	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Rata-rata kecelakaan angkutan penyebarangan/laut melauai pelabuhan yang menyebabkan kematian atau luka parah per tahun	Kecelakaa n / tahun	Jumlah kecelakaan yang terjadi dan menyebabkan kematian atau luka per tahun (Pelabuhan)	Bidang Perhubungan Laut dan Udara	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya pengelolaan transpotasi udara di Bandara Blimbingsari	Jumlah maskapai penerbangan	Maskapai	Menunjukkan jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi di Bandara Blimbingsari	Bidang Perhubungan Laut dan Udara	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	Jumlah penumpang angkutan per tahun	Org/th	Cukup jelas	Bidang Perhubungan Laut dan Udara	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Jumlah prekuensi penerbangan per hari	Kali/hari	Cukup jelas	Bidang Perhubungan Laut dan Udara	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Jumlah kota kota terhubunggi angkutan udara	Kota	Jumlah kota yang dapat terhubunggi angkutan udara	Bidang Perhubungan Laut dan Udara	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya kualitas sarana / prasarana informasi dan komunikasi	Web site milik pemerintah daerah	Ada / Tidak	Cukup jelas	Bidang Komunikasi, Bidang Informasi dan data	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Terpasangnya WiFi di tempat-tempat fasilitas umum	%	Jumlah titik WiFi yang sudah terpasang ----- x 100 % Jumlah titik WiFi yang direncanakan dipasang	Bidang Komunikasi, Bidang Informasi dan data	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Jumlah jaringan komunikasi	Jaringan	Jumlah jaringan telepon genggam ----- Stasioner	Bidang Komunikasi, Bidang Informasi dan data	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Persentase desa yang telah mempunyai jaringan telepon	%	Jumlah desa yang telah mempunyai jaringan telepon ----- x 100 % Jumlah desa	Bidang Komunikasi, Bidang Informasi dan data	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Jumlah surat kabar nasional / lokal	Surat kabar	Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah	Bidang Komunikasi, Bidang Informasi dan data	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Kali/tahun	Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah per tahun	Bidang Komunikasi,	Dinas Perhubungan,

					Bidang Informasi dan data	Komunikasi dan Informatika
		Jumlah penyiaran TV lokal	Kali/tahun	Jumlah penyiaran TV lokal yang masuk ke daerah per tahun	Bidang Komunikasi, Bidang Informasi dan data	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah target PMKS yang ditangani}} \times 100 \%$	Bidang Sosial	Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase PMKS yang mampu melaksanakan fungsi sosialnya	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mampu menjalankan fungsi sosialnya}}{\text{Jumlah target PMKS yang ditangani}} \times 100 \%$	Bidang Sosial	Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PMKS yang memperoleh bantuan sosial	5	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100 \%$	Bidang Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100 \%$	Bidang Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penurunan PMKS	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS Tahun (n-1)} - \text{Jumlah PMKS tahun (n)}}{\text{Jumlah PMKS tahun (n)}} \times 100 \%$	Bidang Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Menurunnya angka kemiskinan	Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan		100 – angka kemiskinan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan ransmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trans.
	Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	%	$\frac{\text{Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Panti sosial yang seharusnya menyediakan}} \times 100 \%$	Bidang Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

			sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		
	Prosentase penduduk mempunyai jaminan sosial ·	%	Jumlah penduduk yang memperoleh jaminan sosial ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk yang seharusnya memperoleh jaminan sosial	Bidang Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur ·		Pekerja anak usia 5 – 14 tahun ----- x 100 % Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Menurunnya tingkat pengangguran	Rasio daya serap tenaga kerja *	%	Pencari kerja yang ditempatkan ----- x 100 % Pencari kerja yang terdaftar	Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas	Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	Angkatan kerja usia 15 tahun ke atas ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Pencari kerja yang ditempatkan		Pencari kerja yang ditempatkan ----- x 100 % Pencari kerja yang terdaftar	Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Tingkat pengangguran terbuka ·	%	Jumlah yang menganggur ----- x 1000 Jumlah angkatan kerja	Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM & TU)	%	Jumlah Transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM & TU) ----- x 100 % Jumlah Transmigrasi	Bidang Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Rasio ketergantungan	%	Penduduk usia < 15 tahun + usia 64 tahun ----- x 100 % Penduduk usia 15 – 64 tahun	Bidang Penempatan, Pelatihan dan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

					Produktivitas	Transmigrasi
		Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	%	Tenaga kerja yang dilatih ----- x 100 % Pendaftar pelatihan kewirausahaan	Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Menurunnya kasus sengketa pengusaha dengan pekerja dan kecelakaan kerja	Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah	%	Kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama ----- x 100 % Kasus yang dicatatkan	Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Keselamatan dan perlindungan kerja	%	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun n ----- x 100 % Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada tahun n	Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya	Kunjungan wisata domestik *	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dalam 1 tahun	Bidang Pariwisata, Bidang Pemasaran	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Kunjungan wisata mancanegara *	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dalam 1 tahun	Bidang Pariwisata, Bidang Pemasaran	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ----- x 100 % Jumlah PDRB	Bidang Pariwisata, Bidang Pemasaran	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Jumlah group kesenian	Group	Jumlah group kesenian per 10.000 penduduk	Bidang Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah gedung	Gedung	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Bidang Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Penyelenggaraan festival seni dan	Kgt	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan	Bidang	Dinas

		budaya ·		budaya dalam 1 tahun	Kebudayaan	Kebudayaan dan Pariwisata
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya ·	Unit	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Bidang Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ·	%	Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100 % Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah	Bidang Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	Jumlah produksi perikanan ·	Ton	Jumlah produksi ikan tangkap + produksi ikan budidaya per tahun	Bidang Perikanan, Bidang Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan
		Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton/Kg	Jumlah produksi ikan tangkap per tahun	Bidang Perikanan, Bidang Kelautan	
		Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton/Kg	Jumlah produksi ikan budidaya per tahun	Bidang Perikanan, Bidang Kelautan	
		Persentase produksi perikanan kelompok nelayan	%	Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan ----- x 100 % Jumlah produksi ikan di daerah	Bidang Perikanan, Bidang Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan
		Nilai konsumsi ikan ·	%	(Hasil produksi (kg) + Pemasukan ikan dari luar (kg)) – (pengiriman ikan ke luar daerah) + (± 15 % prod) (tercecer)* ----- x 100 % Jumlah penduduk	Bidang Perikanan, Bidang Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan
		Cakupan bina kelompok nelayan	%	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemda tahun (n) ----- x 100 % Jumlah kelompok nelayan	Dinas Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan
		Persentase jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda pada tahun (n)	%	Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda pada tahun (n) ----- x 100 % Jumlah kelompok nelayan yang ada	Dinas Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan

		Jumlah produksi ikan yang dipasarkan	%	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan yang dipasarkan}}{\text{Jumlah produksi ikan}} \times 100 \%$	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
		Persentase PAD dari sektor perikanan	%	$\frac{\text{Jumlah PAD sektor perikanan}}{\text{Jumlah PAD}} \times 100 \%$		Dinas Perikanan dan Kelautan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang pendaftaran penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk > 17 tahun yang berKTP}}{\text{Jumlah penduduk > 17 tahun atau telah menikah}} \times 100 \%$	Bidang Administrasi Kependudukan, Bidang Data dan Informasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio pasangan berAkte Nikah	%	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}} \times 100 \%$	Bidang Administrasi Kependudukan, Bidang Data dan Informasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepemilikan KTP	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 dan atau pernah/sudah menikah}} \times 100 \%$	Bidang Administrasi Kependudukan, Bidang Data dan Informasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase jumlah pelayanan dibidang pendaftaran pendudukan yang telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan	%	$\frac{\text{Jumlah pelayanan dibidang pendaftaran pendudukan yang telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan dibidang pendaftaran pendudukan yang telah dilaksanakan}} \times 100 \%$	Bidang Administrasi Kependudukan, Bidang Data dan Informasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak	Menunjukkan ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Bidang Administrasi Kependudukan,	Dinas Kependudukan dan Pencatatan

					Bidang Data dan Informasi Kependudukan	Sipil
	Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang pencatatan sipil	Rasio bayi berAkte Kelahiran	%	Jumlah bayi lahir yang mempunyai akte kelahiran ----- x 100 % Jumlah keseluruhan bayi lahir	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran ----- x 100 % Jumlah penduduk	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DINAS PENDAPATAN	Optimalisasi penerimaan daerah	Pajak daerah (milyar RP)	Rp.	Jumlah pajak daerah yang diterima dalam 1 tahun	Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB	Dinas Pendapatan
		Retribusi Daerah (milyar RP)	Rp.	Jumlah retribusi daerah yang diterima dalam 1 tahun	Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB	Dinas Pendapatan
		Macam pajak daerah	Jenis	Macam (jenis) pajak daerah yang ada	Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB	Dinas Pendapatan
		Macam retribusi daerah	Jenis	Macam (jenis) retribusi daerah yang ada	Bidang Pendataan dan Penetapan,	Dinas Pendapatan

				Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB	
	Jumlah penerimaan lain-lain PAD yang sah (miyar Rp)	Rp.	Jumlah penerimaan lain-lain PAD yang sah dalam 1 tahun	Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB	Dinas Pendapatan
	Persentase potensi penerimaan daerah yang digali	%	Jumlah potensi daerah yang sudah digali/dimanfaatkan ----- x 100 % Jumlah potensi daerah yang ada	Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB	Dinas Pendapatan
	Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD	%	Jumlah PAD yang diterima dalam 1 tahun ----- Jumlah total penerimaan APBD	Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB	Dinas Pendapatan
	Rasio wajib pajak daerah terhadap jumlah penduduk	%	Jumlah wajib pajak daerah yang ada ----- Jumlah penduduk	Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB	Dinas Pendapatan
	Meningkatnya pengelolaan pasar	Tingkat kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar	Komplain	Menunjukkan terjaganya kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar	Bidang Pengelolaan Dinas Pendapatan

		terjaga dengan baik		yang ditunjukkan komplain masyarakat (pengunjung pasar)	Pasar	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan SKPD dengan RPJMD	Persentase SKPD yang menyusun Renstra selaras dengan RPJMD	%	Jumlah SKPD yang menyusun Renstra selaras dengan RPJMD ----- x 100 % Jumlah SKPD	Bidang Data dan Pengendalian Pembangunan	Bappeda
		Persentase SKPD yang menyusun Renja/RKT selaras dengan RKPD	%	Jumlah SKPD yang menyusun Renja/RKT selaras dengan RKPD ----- x 100 % Jumlah SKPD	Bidang Data dan Pengendalian Pembangunan	Bappeda
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase SKPD yang sudah mempunyai SOP perencanaan	%	Jumlah SKPD yang sudah mempunyai SOP perencanaan ----- x 100 % Jumlah SKPD	Bidang Data dan Pengendalian Pembangunan	Bappeda
		Persentase program usulan masyarakat dalam musrenbang dan FGD yang terakomodir dalam RKPD	%	Jumlah program usulan masyarakat dalam musrenbang dan FGD yang terakomodir dalam RKPD ----- x 100 % Jumlah program yang diusulkan masyarakat	Bidang Data dan Pengendalian Pembangunan	Bappeda
		Jumlah Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning)	Sistem	Menunjukkan ada/tidak adanya sistem perencanaan pembangunan (e-planning)	Bidang Data dan Pengendalian Pembangunan	Bappeda
		Jumlah dokumen RPJPD	Dokumen RPJPD	Tersediannya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Bidang Data dan Pengendalian Pembangunan	Bappeda
		Jumlah dokumen perencanaan RPJMD	Dokumen RPJMD	Tersediannya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	Bidang Data dan Pengendalian Pembangunan	Bappeda
		Jumlah dokumen perencanaan RKPD	Dokumen RKPD	Tersediannya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Bidang Data dan Pengendalian Pembangunan	Bappeda
		Jumlah dokumen Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	Dokumen	Tersediannya dokumen Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	Bidang Data dan Pengendalian Pembangunan	Bappeda

	Meningkatnya pengelolaan data / informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Buku "Kabupaten dalam Angka"	Buku	Menunjukkan ada /tidak adanya buku "Kabupaten Dalam Angka"	Bidang Ekonomi	Bappeda
		Jumlah Buku "PDRB Kabupaten"	Buku	Menunjukkan ada /tidak adanya buku PDRB Kabupaten Banyuwangi	Bidang Ekonomi	Bappeda
		Data / informasi publikasi IPM Kabupaten Banyuwangi	Publikasi IPM	Menunjukkan ada /tidak adanya data / informasi publikasi IPM Kabupaten Banyuwangi setiap tahun	Bidang Ekonomi	Bappeda
	Perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungan dan daya dukung sumber daya alam	Zona Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Banyuwangi yang ditetapkan dengan Perda	Dokumen RDTRK	Menunjukkan ada /tidak adanya RDTRK Banyuwangi yan telah ditetapkan melalui Perda	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Bappeda
		Persentase RDTRK wilayah / kawasan yang sudah selesai disusun	%	Jumlah RDTRK wilayah / kawasan yang sudah selesai disusun ----- x 100 % Jumlah RDTRK wilayah / kawasan yang rencana akan disusun	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Bappeda
		Persentase RDTRK wilayah / kawasan yang sudah ditetapkan melalui Perda/ Perbup	%	Jumlah RDTRK wilayah / kawasan yang sudah ditetapkan melalui Perda / Perbup ----- x 100 % Jumlah RDTRK wilayah / kawasan yang sudah dibuat dan rencana akan ditetapkan dalam Perda / Perbup	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Bappeda
		Advice planning (AP) pemanfaatan ruang	Dokumen Advice Planning	Terbit / belum diterbitkannya Advice planning (AP) pemanfaatan ruang	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Bappeda
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)	Sistem	Pemanfaatan Simpeg (seluruh data pegawai masuk Simpeg) dan selalu up date	Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data	Badan Kepegawaian dan Diklat
		Persentase SK kenaikan pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu sesuai periode (secara otomatis)	%	Jumlah SK kenaikan pangkat PNS yang terbit tepat waktu sesuai periode (secara otomatis) dalam tahun x ----- x 100 %	Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data	Badan Kepegawaian dan Diklat

Meningkatnya profesionalisme pegawai			Jumlah PNS yang semestinya terbit SK kenaikan pangkatnya sesuai periode dalam tahun x		
	Persentase SK kenaikan gaji berkala PNS yang terbit tepat waktu (secara otomatis)	%	Jumlah SK kenaikan gaji berkala PNS yang terbit tepat waktu (secara otomatis) dalam tahun x ----- x 100 % Jumlah PNS yang semestinya terbit SK kenaikan gaji berkalanya dalam tahun x	Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data	Badan Kepegawaian dan Diklat
	Persentase pejabat struktural yang lulus Diklatpim sesuai eselon	%	Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklatpim sesuai eselon ----- x 100 % Jumlah pejabat struktural yangtelah mengikuti Diklatpim	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Diklat
	Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya	%	Jumlah PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya ----- x 100 % Jumlah PNS	Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai	Badan Kepegawaian dan Diklat
	Persentase PNS yang mengikuti/ lulus diklat (non diklatpim) yang dapat mengimplementasikan hasil diklat	%	Jumlah PNS yang mengikuti/ lulus diklat (non diklatpim) yang dapat mengimplementasikan hasil diklat ----- x 100 % Jumlah PNS yang ikut diklat (non diklatpim)	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Diklat
	Persentase PNS yang berpendidikan S3	%	Jumlah PNS yang berpendidikan S3 ----- x 100 % Jumlah PNS	Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data	Badan Kepegawaian dan Diklat
	Persentase PNS yang berpendidikan S2	%	Jumlah PNS yang berpendidikan S2 ----- x 100 % Jumlah PNS	Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data	Badan Kepegawaian dan Diklat
	Persentase PNS yang berpendidikan S1	%	Jumlah PNS yang berpendidikan S1 ----- x 100 % Jumlah PNS	Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data	Badan Kepegawaian dan Diklat
Meningkatnya disiplin PNS	Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1	%	Menunjukkan tingkat kehadiran seluruh PNS	Bidang	Badan

		tahun		dalam 1 tahun	Pengendalian dan Pengolahan Data	Kepegawaian dan Diklat
		Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin dalam 1 tahun	%	Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin (ringan, sedang dan berat) dalam 1 tahun ----- x 100 % Jumlah PNS	Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data	Badan Kepegawaian dan Diklat
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Perda tentang APBD ditetapkan tepat waktu	Dokumen APBD	Perda tentang APBD ditetapkan tepat waktu	Bidang anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan tepat waktu	Dokumen	Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan tepat waktu	Bidang anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pedoman Pelaksanaan APBD ditetapkan tepat waktu	Pedoman	Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan tepat waktu	Bidang anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Perda tentang Pertanggungjawaban APBD ditetapkan tepat waktu	Dokumen	Perda tentang Pertanggungjawaban APBD ditetapkan tepat waktu	Bidang anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawaban APBD ditetapkan tepat waktu	Dokumen	Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Penjabaran APBD ditetapkan tepat waktu	Bidang anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Sistem Informasi Keuangan Daerah	Sistem	Tersedianya sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Bidang AKuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Laporan keuangan sesuai Standart Akuntansi Pemerintah dan tepat waktu	Laporan	Laporan keuangan disusun sesuai Standart Akuntansi Pemerintah	Bidang Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

	Persentase SKPD yang menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan penyampaian tepat waktu	%	Jumlah SKPD yang menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan penyampaian tepat waktu ----- x 100 % Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan	Bidang Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	%	Jumlah SP2D diterbitkan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku ----- x 100 % Jumlah SP2D yang diterbitkan	Bidang Pengelolaan Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah	Jumlah sistem informasi dan penatausahaan aset	Sistem	Adanya sistem pengelolaan aset daerah	Bidang Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Data aset barang daerah yang akuntabel	Dokumen	Adanya data aset barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Bidang Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah laporan aset	Laporan	Adanya laporan aset sesuai ketentuan yang berlaku	Bidang Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah laporan pengadaan barang daerah	Laporan	Adanya laporan pengadaan barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Bidang Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah laporan daftar kebutuhan barang daerah	Laporan	Adanya laporan daftar kebutuhan barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Bidang Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah laporan pemeliharaan barang daerah	Laporan	Adanya laporan pemeliharaan barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Bidang Aset	Badan Pengelolaan

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase barang daerah yang direvaluasi / apraisal aset / barang daerah	%	Jumlah barang daerah yang sudah direvaluasi / apraisal aset / barang daerah ----- x 100 % Jumlah barang daerah yang direncanakan akan direvaluasi / apraisal	Bidang Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase aset daerah yang bersertifikat	%	Jumlah aset daerah yang sudah bersertifikat ----- x 100 % Jumlah aset daerah yang seharusnya bersertifikat	Bidang Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik	Jumlah partai politik yang telah memenuhi ketentuan	Parpol	Partai politik yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku	Bidang Budaya Politik dan HAM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	%	Jumlah masyarakat yang mengikuti pemungutan suara Pemilu/Pilkada ----- 100 % Jumlah masyarakat yang mempunyai hak memilih dalam Pemilu/Pilkada	Bidang Budaya Politik dan HAM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kegiatan pembinaan politik daerah	Kgt	Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	Bidang Budaya Politik dan HAM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meminimalisir terjadinya ketegangan dan ancaman konflik sara	Jumlah masalah / kejadian terkait ketahanan bangsa	Masalah/ kejadian	Jumlah masalah / kejadian terkait ketahanan bangsa yang terjadi dalam 1 tahun	Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase konflik bernuansa sara yang ditangani	%	Jumlah konflik bernuansa sara yang ditangani ----- x 100 % Jumlah konflik bernuansa sara	Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

					Penanganan Konflik	
	Terwujudnya peran aktif, penguatan dan pemberdayaan ormas dan LSM	Jumlah LSM atau Ormas yang memenuhi syarat (legal)	LSM / Ormas	Jumlah LSM/Ormas yang aktif dan memenuhi syarat (legal)	Bidang Budaya Politik dan HAM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kgt	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dalam 1 tahun	Bidang Budaya Politik dan HAM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	$\frac{\text{Jumlah desa berswasembada}}{\text{Jumlah desa}} \times 10.000$	Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Lembaga	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$	Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}}$	Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah kelompok binaan masyarakat	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Persentase LPM Berprestasi	%	$\frac{\text{Jumlah LPM Berprestasi}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Partisipasi	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

				Masyarakat dan Sosial Budaya	Pemerintahan Desa
	Persentase PKK aktif	%	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase Posyandu aktif	%	$\frac{\text{Jumlah Posyandu aktif}}{\text{Jumlah Posyandu}} \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah fasilitas umum di desa yang diselesaikan secara gotong royong	Unit	Cukup jelas	Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat}}{\text{Total program pemberdayaan masyarakat}} \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	$\frac{\text{Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat}}{\text{Total pasca program pemberdayaan masyarakat}} \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	$\frac{\text{Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik}}{\text{Jumlah seluruh pemerintahan desa}} \times 100 \%$	Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
BADAN	Meningkatnya program	Persentase partisipasi perempuan di	%	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Bidang

PEMBERDAYAA PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender	lembaga pemerintah		----- x 100 % Jumlah pekerja perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	Pekerja perempuan di lembaga swasta ----- x 100 % Jumlah pekerja perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga lagislatif	%	Pekerja perempuan di lembaga legislatif ----- x 100 % Jumlah pekerja perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Persentase perempuan yang menjabat eselon II, III dan IV	%	Jumlah perempuan yang menjabat eselon II, III dan IV ----- x 100 % Jumlah PNS perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam tahun x	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Rasio KDRT .	%	Jumlah KDRT ----- x 100 % Jumlah rumah tangga	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu ----- x 100 % Jumlah pengaduan / laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
	Meningkatnya peserta Keluarga Berencana aktif	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	Jumlah anak ----- Jumlah keluarga	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga	Badan Pemberdayaan Perempuan dan

					Sejahtera	KB
		Rasio akseptor Keluarga Berencana	%	Jumlah akseptor Keluarga Berencana ----- x 100 % Jumlah pasangan usia subur	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Cakupan peserta Keluarga Berencana aktif	%	Jumlah pasangan usia subur / PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x 100 % Seluruh pasangan usia subur di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dibandingkan jumlah total keluarga	%	Jumlah Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I ----- x 100 % Jumlah keluarga	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Tingkat partisipasi pria dalam ber KB	%	Jumlah pria nikah yang menggunakan kontrasepsi ----- x 100 % Jumlah pria nikah	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 th	%	Jumlah PUS yang usia istrinya < 20 th ----- x 100 % Jumlah PUS yang usia istrinya 15 – 49 th	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
		Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	%	Jumlah PUS peserta KB aktif ----- x 100 % Jumlah PUS	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Bidang Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) *	Rp.	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA)	Bidang Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

		Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	Realisasi PMDN tahun evaluasi - Realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi ----- x 100 % Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Bidang Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
		Pameran investasi daerah yang dilaksanakan/diikuti dalam 1 tahun	Kgt	Cukup jelas	Bidang Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Lama proses perijinan	Hari	Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)	Bidang Perizinan	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
		Penyelesaian ijin lokasi	%	Jumlah ijin lokasi yang terselesaikan ----- x 100 % Jumlah pemohon ijin lokasi	Bidang Perizinan	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
		Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah	Sistem	Ada / Tidaknya Sistem Informasi Perijinan dan Administrasi Pemerintah	Bidang Perizinan	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
		Jumlah ijin yang diselesaikan dalam 1 tahun (berbagai jenis ijin)	Ijin	Jumlah berbagai jenis ijin yang sudah diselesaikan dalam 1 tahun sesuai permohonan	Bidang Perizinan	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi	Persentase perusahaan yang telah mempunyai sistem pengelolaan limbah	% Jumlah perusahaan yang memiliki sistem pengelolaan limbah ----- x 100 % Jumlah seluruh perusahaan	Bidang pemantauan dan pemulihan	Badan Lingkungan Hidup
			Persentase luas pemukiman yang tertata	% Luas area permukiman yang tertata ----- x 100 % Luas area permukiman keseluruhan	Bidang pemantauan dan pemulihan	Badan Lingkungan Hidup
			Persentase sekolah yang tertata	% Jumlah sekolah yang tertata ----- x 100 %	Bidang pemantauan dan	Badan Lingkungan

			Jumlah sekolahan	pemulihan	Hidup
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal .	%	Jumlah perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi ----- x 100 % Jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal	Bidang pengawasan dan pengendalian	Badan Lingkungan Hidup
	Penegakan hukum lingkungan .	%	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda ----- x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada	Bidang pengawasan dan pengendalian	Badan Lingkungan Hidup
	Terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah	Pencemaran status mutu air .	% Jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber data air yang terpantau mutu airnya ----- x 100 % Jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air	Bidang pemantauan dan pemulihan	Badan Lingkungan Hidup
		Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil.	% Panjang sungai yang dibersihkan ----- x 100 % Total target panjang sungai yang akan dibersihkan	Bidang pengawasan dan pengendalian	Badan Lingkungan Hidup
	Terlidunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosisten hutan	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air .	% Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air ----- x 100 % Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Bidang pemantauan dan pemulihan	Badan Lingkungan Hidup
	Membaiknya kualitas udara emisi dan ambient	Pengujian kadar polusi limbah gas/udara yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt Jumlah pengujian kadar polusi limbah gas/udara yang dilaksanan dalam 1 tahun	Bidang pemantauan dan pemulihan	Badan Lingkungan Hidup
		Penurunan tingkat pencemaran udara per kapita	% Tingkat pencemaran udara pada tahun (n-1) – Tingkat pencemaran udara pada tahun (n1) ----- x 100 % Tingkat pencemaran pada tahun (n1)	Bidang pemantauan dan pemulihan	Badan Lingkungan Hidup
		Tingkat kualitas udara	% Tingkat kualitas udara berdasarkan hasil pengujian pada tahun x	Bidang pemantauan dan pemulihan	Badan Lingkungan Hidup

KANTOR KETAHANAN PANGAN	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	Beras (Ton)	Ton	Gabah kering giling x 62,74 %	Seksi Ketersediaan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
		Kesediaan pangan utama	%	Rata-rata jumlah Kesediaan pangan utama per tahun (Kg) ----- x 100 % Jumlah penduduk	Seksi Ketersediaan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
		Ketersediaan energi dan protein perkapita	%	Tingkat ketersediaan energi 2.200 Kkal/Kapita/ Hari dan protein 57 gram/perkapita/perhari	Seksi Ketersediaan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
		Penguatan cadangan pangan -Nilai Capaian bidang Kabupaten	%	Jumlah cadandangan pangan kabupaten ----- x 100 % 100 ton	Seksi Ketersediaan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
		-Persentase kecamatan yang mempunyai cadangan pangan masyarakat	%	Jumlah kecamatan yg mempunyai cadangan pangan ----- x 100 % Jumlah kecamatan		
		Persentase desa yang telah memenuhi swasembada pangan	%	Jumlah desa yang berstatus swasembada pangan ----- x 100 % Jumlah desa	Seksi Ketersediaan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
	Distribusi dan akses pangan terjaga	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	Ketersediaan data dan informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/bulanan/kuartal / tahunan	Seksi distribusi pangan	Kantor Ketahanan Pangan
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 kondisi normal, dan Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu	Seksi distribusi pangan	Kantor Ketahanan Pangan

				wilayah berkisar antara 5 % - 40 %.		
	Meningkatnya penganekaragaman pangan dan terjaganya keamanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	Seksim Komsumsi dan Penganekaragaman pangan	Kantor Ketahanan Pangan
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu ----- x 100 % Jumlah total sampel pangan yang diambil di pedagang pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	Seksim Komsumsi dan Penganekaragaman pangan	Kantor Ketahanan Pangan
	Penanganan kerawanan pangan	Presentase daerah rawan pangan yang mendapat penanganan pada tahun x	%	Jumlah daerah rawan pangan yang mendapat penanganan pada tahun x ----- x 100 % Jumlah daerah rawan pangan yang ada pada tahun x	Seksi Ketersediaan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Jumlah perpustakaan	Unit	Jumlah perpustakaan se Kab. Banyuwangi	Seksi Pelayanan dan Informasi	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
		Pameran buku yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt	Kegiatan pameran buku yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Seksi Pelayanan dan Informasi	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
		Jumlah pengunjung pameran buku	Orang	Cukup jelas	Seksi Pelayanan dan Informasi	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Orang	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan Umum dan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

				Keliling	
	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling per tahun	Orang	Jumlah kunjungan ke perpustakaan keliling (mobil perpustakaan) selama 1 tahun	Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan Umum dan Keliling	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku dan Judul	Cukup jelas	Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan Umum dan Keliling	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Meningkatnya pengelolaan perpustakaan	Persentase SDM pengelolaan perpustakaan yang kompeten	%	Jumlah SDM pengelola perpustakaan yang kompeten ----- x 100 % Jumlah SDM pengelola perpustakaan	Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan Umum dan Keliling	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Meningkatnya pengelolaan arsip dan dokumentasi	Pengelolaan arsip secara baku	%	Jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah menerapkan arsip secara baku ----- x 100 % Jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD)	Seksi Arsip dan Dokumentasi	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
	Pembinaan / pelatihan bagi SDM pengelola kearsipan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan sumber daya Manusia (SDM) pengelola kearsipan	Seksi Arsip dan Dokumentasi	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
	Tersimpannya arsip inaktif dan statis	%	Jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengirimkan arsip ----- x 100 % Jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD)	Seksi Arsip dan Dokumentasi	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
	Persentase jumlah arsip statis yang diolah	%	Jumlah arsip statis yang diolah ----- x 100 % Jumlah arsip statis	Seksi Arsip dan Dokumentasi	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

		Persentase jumlah arsip in aktif yang diolah	%	Jumlah arsip in aktif yang diolah ----- x 100 % Jumlah arsip in aktif	Seksi Arsip dan Dokumentasi	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
RSUD BLAMBANGAN	Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai standar pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Indeks Kepuasan Masyarakat hasil survey	Sekretariat	Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
		Bed Occupancy Rate (BOR)	%	Jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu ----- x 100 % Jumlah tempat tidur x 365 hari	Bidang Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
		Average Length of Stay (ALOS)	Hari	Jumlah lama dirawat pasien keluar RS ----- Jumlah pasien keluar RS (hidup + meninggal)	Bidang Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
		Bed Turn Over (BTO)	Kali	Jumlah pasien keluar RS (hidup + meninggal) ----- Jumlah tempat tidur	Bidang Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
		Turn Over Interval (TOI)	Hari	(Jumlah tempat tidur x 365 hari) – hari perawatan ----- Jumlah pasien keluar RS (hidup + meninggal)	Bidang Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
		Gross Death Rate (GDR)	%o	Jumlah pasien mati seluruhnya ----- x 100 % Jumlah pasien keluar RS (hidup + meninggal)	Bidang Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
		Net Death Rate (NDR)	%o	Jumlah pasien mati > 48 jam dirawat ----- x 100 % Jumlah pasien keluar RS (hidup + meninggal)	Bidang Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
	Meningkatnya kemandirian keuangan Rumah sakit	Cost Recovery Ratio (CRR)	%	Pendapatan operasional ----- x 100 % Belanja operasional	Bidang Keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
		Tingkat kemandirian keuangan rumah sakit	%	Pendapatan Rumah Sakit ----- x 100 % Total Belanja Rumah Sakit	Bidang Keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
RSUD GENTENG	Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Indeks Kepuasan Masyarakat hasil survey	Bidang Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah

	sesuai standar pelayanan					Genteng
		Bed Occupancy Rate (BOR)	%	Jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu ----- x 100 % Jumlah tempat tidur x 365 hari	Bidang Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
		Average Length of Stay (ALOS)	Hari	Jumlah lama dirawat pasien keluar RS ----- Jumlah pasien keluar RS (hidup + meninggal)	Bidang Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
		Bed Turn Over (BTO)	Kali	Jumlah pasien keluar RS (hidup + meninggal) ----- Jumlah tempat tidur	Bidang Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
		Turn Over Interval (TOI)	Hari	(Jumlah tempat tidur x 365 hari) – hari perawatan ----- Jumlah pasien keluar RS (hidup + meninggal)	Bidang Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
		Gross Death Rate (GDR)	%o	Jumlah pasien mati seluruhnya ----- x 100 % Jumlah pasien keluar RS (hidup + meninggal)	Bidang Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
		Net Death Rate (NDR)	%o	Jumlah pasien mati > 48 jam dirawat ----- x 100 % Jumlah pasien keluar RS (hidup + meninggal)	Bidang Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
	Meningkatnya kemandirian keuangan Rumah sakit	Cost Recovery Ratio (CRR)	%	Pendapatan operasional ----- x 100 % Belanja operasional	Bidang Keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
		Tingkat kemandirian keuangan rumah sakit	%	Pendapatan Rumah Sakit ----- x 100 % Total Belanja Rumah Sakit	Bidang Keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Meningkatnya pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	Jumlah mobil PMK ----- x 100 % Jumlah penduduk	Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan	Badan Penanggulanga Bencana Daerah
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen	%	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK) ----- x 100 %	Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan	Badan Penanggulanga n Bencana

		Kebakaran (WMK)		Luas wilayah kabupaten		Daerah
	Meningkatnya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana	Peta wilayah rawan bencana	Peta	Tersedianya peta rawan bencana	Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
		Jumlah Sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt	Cukup jelas	Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
		Jumlah Simulasi saat terjadinya bencana yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt	Cukup jelas	Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
	Tertanganinya pasca bencana	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	%	Jumlah kebutuhan dasar yang disediakan ----- x 100 % Jumlah kebutuhan dasar yang diperlukan	Bidang kedaruratan dan logistik	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
		Tingkat pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana	%	Sarana dan prasarana yang diperbaiki pasca bencana	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	Kasus	Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun ----- x 10.000 Jumlah penduduk seluruhnya	Bidang Ketertiban Umum dan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
		Angka kriminalitas yang tertangani	Kasus	Jumlah kriminalitas yang tertangani selama 1 tahun ----- x 100 % Jumlah kriminalitas yang ada selama 1 thn	Bidang Ketertiban Umum dan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah demo	Demo	Jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 tahun	Bidang Ketertiban Umum dan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	Jumlah polisi pamong praja ----- x 10.000 Jumlah penduduk	Bidang Ketertiban Umum dan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja

		Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	Orang	Jumlah perlindungan masyarakat (linmas) ----- x 10.000 Jumlah penduduk	Bidang Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
		Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	Jumlah pos siskamling ----- Jumlah Kelurahan / Desa	Bidang Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
		Cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja	Kgt	Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam	Bidang Ketertiban Umum dan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	Pelanggaran K3 yang terselesaikan ----- x 100 % Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP	Bidang Ketertiban Umum dan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penegakan PERDA	%	Jumlah penyelesaian penegakan Perda ----- x 100 % Jumlah pelanggaran Perda	Bidang Penegakan per-UU-an daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya peran Satuan Linmas	Persentase anggota Satuan Linmas yang kompeten dalam bencana dan pengamanan swakarsa	%	Jumlah anggota Satlinmas yang terlatih ----- x 100 % Jumlah anggota Satlinmas	Bidang Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
KECAMATAN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase jumlah permohonan KK/KTP yang dilayani sesuai standar pelayanan	%	Jumlah permohonan KK/KTP yang dilayani sesuai standar pelayanan ----- x 100 % Jumlah seluruh permohonan KK/KTP	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan
		Persentase jumlah permohonan perizinan yang dilayani sesuai standar pelayanan	%	Jumlah permohonan perijinan yang dilayani sesuai standar pelayanan ----- x 100 % Jumlah seluruh permohonan perijinan	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan
		Persentase jumlah permohonan pelayanan surat-surat yang dilayani sesuai standar pelayanan	%	Jumlah permohonan pelayanan surat-surat yang dilayani sesuai standar pelayanan ----- x 100 % Jumlah seluruh permohonan surat-surat	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan

	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Indeks Kepuasan Masyarakat hasil survey	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan
	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang ditindaklanjuti	%	Jumlah pengaduan pelayanan publik yang ditindaklanjuti ----- x 100 % Jumlah seluruh pengaduan pelayanan publik	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan
	Sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif (ruang tunggu, kursi tunggu, TV, AC/kipas angin, majalah/koran, brosur layanan, area parkir, sarana pengaduan dll)	Sarpras	Tersedianya Sarpras Pelayanan Publik yang layak sesuai standar pelayanan publik	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan
Meningkatnya kebersihan, kenyamanan dan keindahan lingkungan	Luas RTH yang tertata dengan baik	M2	Cukup jelas	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan
	Gerakan kebersihan “Jum’at Bersih” yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kegt	Kegiatan bersih-bersih bersama masyarakat yang dilakukan selama 1 tahun	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan
	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Jum’at Bersih	%	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Jum’at Bersih ----- x 100 % Jumlah Desa/Kelurahan	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan
	Persentase volume sampah yang terangkut	%	Volume sampah yang terangkut setiap hari ----- x 100 % Volume sampah seluruhnya	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan
Meningkatnya pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	Persentase jumlah Pos Kamling aktif	%	Jumlah pos kamling yang dimanfaatkan untuk jaga ----- x 100 % Jumlah seluruh pos kamling yang ada	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan
	Jumlah petugas Linmas	Orang	Cukup jelas	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan
	Persentase penurunan tindak kriminal di masyarakat pada tahun x	%	Jumlah tindak kriminal tahun (n1) – Jumlah tindak kriminal tahun (n-1)	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan

				----- x 100 % Jumlah tindak kriminal tahun (n1)			
		Penyuluhan/sosialisasi tentang hukum / Kamtrantibmas yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt	Kegiatan penyuluhan/sosialisasi hukum/Kamtrantibmas dalam 1 tahun	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan	%	Jumlah masyarakat yang hadir dalam Musrenbangcam ----- x 100 % Jumlah seluruh masyarakat yang diundang pada kegiatan Musrenbangcam	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan	
		Persentase usulan masyarakat (kelurahan/desa) yang direkomendasikan di tingkat kecamatan	%	Jumlah program/kegiatan usulan masyarakat (kelurahan/desa) yang direkomendasikan ----- x 100 % Jumlah seluruh program/kegiatan yang diusulkan	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan	
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat desa/kelurahan	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks nara pidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt	Cukup jelas	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan	
		Pembinaan PKK desa/kelurahan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt	Cukup jelas	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan	
		Kegiatan PKK yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt	Cukup jelas	Sekretariat, Seksi-seksi	Kecamatan	
	KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase jumlah permohonan KK/KTP yang dilayani sesuai standar pelayanan	%	Jumlah permohonan KK/KTP yang dilayani sesuai standar pelayanan ----- x 100 % Jumlah seluruh permohonan KK/KTP	Sekretariat, Seksi-seksi	Kelurahan
			Persentase jumlah permohonan perizinan yang dilayani sesuai standar pelayanan	%	Jumlah permohonan perijinan yang dilayani sesuai standar pelayanan ----- x 100 % Jumlah seluruh permohonan perijinan	Sekretariat, Seksi-seksi	Kelurahan

	Persentase jumlah permohonan pelayanan surat-surat yang dilayani sesuai standar pelayanan	%	Jumlah permohonan pelayanan surat-surat yang dilayani sesuai standar pelayanan ----- x 100 % Jumlah seluruh permohonan surat-surat	Sekretariat, Seksi-seksi	Kelurahan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Indeks Kepuasan Masyarakat hasil survey	Sekretariat, Seksi-seksi	Kelurahan
	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang ditindaklanjuti	%	Jumlah pengaduan pelayanan publik yang ditindaklanjuti ----- x 100 % Jumlah seluruh pengaduan pelayanan publik	Sekretariat, Seksi-seksi	Kelurahan
	Sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif (ruang tunggu, kursi tunggu, TV, AC/kipas angin, majalah/koran, brosur layanan, area parkir, sarana pengaduan dll)	Sarpras	Tersedianya Sarpras Pelayanan Publik yang layak sesuai standar pelayanan publik	Sekretariat, Seksi-seksi	Kelurahan
Meningkatnya kebersihan, kenyamanan dan keindahan lingkungan	Luas RTH yang tertata dengan baik	M2	Cukup jelas	Sekretariat, Seksi-seksi	Kelurahan
	Gerakan kebersihan “Jum’at Bersih” yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kegt	Kegiatan bersih-bersih bersama masyarakat yang dilakukan selama 1 tahun	Sekretariat, Seksi-seksi	Kelurahan
	Persentase volume sampah yang terangkut	%	Volume sampah yang terangkut setiap hari ----- x 100 % Volume sampah seluruhnya	Sekretariat, Seksi-seksi	Kelurahan
Meningkatnya pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	Persentase jumlah Pos Kamling aktif	%	Jumlah pos kamling yang dimanfaatkan untuk jaga ----- x 100 % Jumlah seluruh pos kamling yang ada	Sekretariat, Seksi-seksi	Kelurahan
	Jumlah petugas Linmas	Orang	Cukup jelas	Sekretariat, Seksi-seksi	Kelurahan
	Persentase penurunan tindak kriminal di masyarakat pada tahun x	%	Jumlah tindak kriminal tahun (n1) – Jumlah tindak kriminal tahun (n-1)	Sekretariat, Seksi-seksi	Kelurahan

				----- x 100 % Jumlah tindak kriminal tahun (n1)		
		Penyuluhan/sosialisasi tentang hukum / Kamtrantibmas yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt	Kegiatan penyuluhan/sosialisasi hukum/Kamtrantibmas dalam 1 tahun	Sekretariat, Seksi-seksi	Kelurahan
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks nara pidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt	Cukup jelas	Sekretariat, Seksi-seksi	Kelurahan
		Kegiatan PKK yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kgt	Cukup jelas	Sekretariat, Seksi-seksi	Kelurahan

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun system manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan SKPD tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS